

REVOLUSI BISNIS BUMD : MEMBANGUN Keadilan Sosial MELALUI PENGELOLAAN BERBASIS NILAI KETUHANAN DAN ETIKA

Josephin Kezia¹, Tiffany Aprilia², Marthin Okuli³, Nasirwan⁴

Universitas Negeri Medan

e-mail: josephinkezia353@gmail.com¹, apriliatiffany7@gmail.com²,
marthinsitompul06@gmail.com³, nasirwan@unimed.ac.id⁴

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan nilai-nilai ketuhanan dan prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, dan data tahunan BUMD penelitian ini menemukan bahwa integrasi nilai spiritual seperti kejujuran, amanah, dan keadilan dalam tata kelola BUMD tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga mendorong transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, etika bisnis terbukti menjadi instrumen penting dalam membentuk budaya organisasi yang akuntabel dan peduli terhadap kepentingan masyarakat. BUMD yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten mampu memberikan dampak positif terhadap pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas layanan publik. Penelitian ini juga mengungkap adanya tantangan implementasi, seperti rendahnya literasi etis manajerial dan keterbatasan regulasi pendukung. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan kebijakan, reformasi budaya organisasi, dan peningkatan partisipasi publik dalam memperkuat transformasi moral bisnis BUMD.

Kata Kunci: BUMD, Nilai Ketuhanan, Etika Bisnis, Keadilan Sosial, Pengelolaan Berbasis Moral, Pembangunan Daerah.

Abstract – This study aims to analyze how the application of divine values and ethical principles in the management of Regionally-Owned Enterprises (BUMD) can contribute to equitable and sustainable social development. Using a descriptive qualitative approach with data collection techniques through literature studies, and annual BUMD data, this study found that the integration of spiritual values such as honesty, trustworthiness, and justice in BUMD governance not only strengthens public trust, but also encourages transparency and corporate social responsibility. In addition, business ethics has proven to be an important instrument in forming an organizational culture that is accountable and cares about the interests of the community. BUMDs that consistently apply these principles are able to provide a positive impact on economic equality, poverty alleviation, and improving the quality of public services. This study also reveals implementation challenges, such as low managerial ethical literacy and limited supporting regulations. Therefore, policy support, organizational culture reform, and increased public participation are needed in strengthening the moral transformation of BUMD businesses.

Keywords: BUMD, Godly Values, Business Ethics, Social Justice, Moral-Based Management, Regional Development.

PENDAHULUAN

Revolusi bisnis yang kini sedang berkembang membawa tantangan baru bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan. Etika bisnis merupakan aspek penting dalam menjalankan kegiatan bisnis, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai moral yang mendasari setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, Suatu perusahaan akan berhasil bukan hanya berlandaskan moral dan manajemen yang baik saja, tetapi juga harus memiliki etika bisnis yang baik. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan pengelolaan BUMD yang berbasis pada nilai ketuhanan

dan etika, sebagai landasan moral dan sosial yang mengarahkan perusahaan untuk mendukung keadilan sosial di tengah masyarakat. Hal ini akan mengoptimalkan peran BUMD sebagai agen pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut M. Dawam Rahardjo (2001), BUMD seharusnya tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan kontribusinya terhadap pembangunan sosial yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemakmuran bersama. Pendapat ini diperkuat oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2007), yang mengemukakan bahwa nilai ketuhanan dalam bisnis bertujuan untuk menciptakan kebaikan sosial yang lebih luas, tidak hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat banyak.

Menurut Sutrisno (2013), etika bisnis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ketuhanan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial. Hal ini dikarenakan Nilai Ketuhanan mencerminkan hubungan manusia dengan penciptanya dan nilai kemanusiaan mencerminkan hubungan manusia dengan sesamanya, sehingga hal inilah yang menjadi alasan mengapa nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan paling relevan dijadikan sumber dalam pencegahan tindak pidana korupsi. BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD kepada daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan unit usaha milik pemerintah yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumberdaya daerah, memberikan pelayanan masyarakat atau publik services serta mencari keuntungan. Pengelolaan BUMD yang etis, berbasis pada prinsip moralitas yang luhur, akan menghasilkan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh pemangku kepentingan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Hal serupa disampaikan oleh James E. Post et al. (2002), yang menekankan pentingnya etika dalam strategi bisnis untuk memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat, serta menjaga reputasi dan kredibilitas organisasi.

Dalam pandangan lainnya, menurut H. A. A. Widyana (2009), BUMD perlu dilihat sebagai entitas yang memiliki kewajiban moral untuk menciptakan nilai tambah sosial, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Penekanan pada aspek ketuhanan dan etika dalam bisnis akan memberikan dampak positif terhadap penciptaan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini didukung oleh pandangan Michael E. Porter dan Mark R. Kramer (2011), yang mengungkapkan bahwa bisnis yang memperhatikan isu sosial akan menciptakan nilai tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, menurut J. S. Mill (1848), prinsip keadilan sosial harus dijadikan dasar dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan BUMD. Pengelolaan yang berbasis pada nilai ketuhanan, dengan orientasi pada kemaslahatan bersama, dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, teori etika bisnis yang berbasis pada nilai-nilai moral dan spiritual menjadi sangat relevan untuk diterapkan dalam setiap aspek operasional BUMD.

Pendekatan ini juga sejalan dengan pendapat dari Peter Drucker (2001), yang menekankan bahwa dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, BUMD diharapkan dapat menjadi model dalam implementasi nilai ketuhanan dan etika dalam bisnis, yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah dan sosial.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, revolusi bisnis dalam BUMD yang berbasis pada nilai ketuhanan dan etika tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pengelolaan yang adil dan

bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat memperkuat peran BUMD dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, menyediakan layanan publik, serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Namun, tantangan modern menuntut transformasi paradigma bisnis BUMD dari sekadar entitas pencari keuntungan menjadi agen pembangunan yang bermoral dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai ketuhanan dan etika bisnis menjadi semakin relevan dan mendesak.

Menurut M. Dawam Rahardjo (2001), BUMD semestinya tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga harus turut serta dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Muhammad Syafi'i Antonio (2007) yang menekankan bahwa nilai-nilai spiritual dalam bisnis bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan yang lebih luas. Sutrisno (2013) juga menyatakan bahwa integrasi nilai ketuhanan dan kemanusiaan dapat menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan sosial, serta berperan dalam pencegahan tindakan tidak etis seperti korupsi.

James E. Post et al. (2002) memperkuat argumen tersebut dengan menyatakan bahwa etika dalam strategi bisnis memperkuat kredibilitas dan hubungan perusahaan dengan masyarakat. Selanjutnya, Widyana (2009) melihat BUMD sebagai entitas bermoral yang harus menciptakan nilai sosial dan bukan hanya mengejar keuntungan. Teori *shared value* dari Michael Porter dan Mark Kramer (2011) juga mendukung bahwa bisnis dapat sekaligus menciptakan nilai bagi perusahaan dan masyarakat. Sementara itu, J.S. Mill (1848) menekankan bahwa prinsip keadilan sosial adalah fondasi dalam setiap aktivitas ekonomi.

Dari keseluruhan literatur tersebut, jelas bahwa pendekatan pengelolaan berbasis nilai ketuhanan dan etika bisnis bukan hanya ideal secara moral, tetapi juga strategis dalam menciptakan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami bagaimana pengelolaan BUMD yang berbasis pada nilai ketuhanan dan etika dapat berkontribusi dalam membangun keadilan sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menggali lebih dalam tentang fenomena yang terkait dengan implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam dunia bisnis, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan sosial. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih komprehensif melalui studi literatur, wawancara, dan analisis kasus terkait BUMD.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumentasi: Penelitian ini juga akan menganalisis berbagai dokumen yang terkait dengan pengelolaan BUMD, seperti laporan tahunan, kebijakan perusahaan, serta peraturan daerah yang mengatur aktivitas BUMD. Hal ini bertujuan untuk memahami sejauh mana nilai ketuhanan dan etika diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik operasional BUMD.
2. Studi Literatur: Mengumpulkan dan menganalisis karya-karya ilmiah, artikel, dan teori-teori dari para ahli yang membahas tentang etika bisnis, nilai ketuhanan, dan keadilan sosial dalam konteks bisnis BUMD. Ini termasuk referensi dari M. Dawam Rahardjo (2001), Muhammad Syafi'i Antonio (2007), Sutrisno (2013), James E. Post et al. (2002), dan lainnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana data

yang diperoleh dari studi dokumentasi, dan studi literatur akan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan topik penelitian, seperti nilai ketuhanan, etika bisnis, dan keadilan sosial. Data yang telah dikelompokkan akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam pengelolaan BUMD yang mendukung tercapainya keadilan sosial.

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (dokumen dan literatur) untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat dan komprehensif. Reliabilitas penelitian dijaga dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara rinci dan menerapkan prosedur pengumpulan data yang konsisten di setiap tahap.

Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama satu bulan, dengan pembagian waktu untuk pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan penelitian.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana pengelolaan BUMD berbasis nilai ketuhanan dan etika dapat mendukung tercapainya keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengintegrasian Nilai Ketuhanan dalam Tata Kelola BUMD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan paradigma dalam pengelolaan beberapa BUMD, dari yang sebelumnya berorientasi semata-mata pada profit (keuntungan finansial), kini mulai menerapkan prinsip-prinsip nilai ketuhanan sebagai fondasi tata kelola yang berorientasi moral dan sosial. Pengelolaan BUMD berbasis nilai ketuhanan bukanlah sekadar simbolisme religius, melainkan bentuk konkret dari upaya membangun struktur ekonomi daerah yang lebih beradab dan inklusif. Berdasarkan data hasil pengamatan, ditemukan bahwa sejumlah BUMD telah mulai mempraktikkan prinsip-prinsip spiritual seperti amanah (tanggung jawab), kejujuran, keadilan, dan empati sosial dalam pengambilan keputusan strategis dan pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan nilai ketuhanan mendorong para pengelola BUMD untuk tidak hanya mengejar efisiensi dan laba, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan korporasi memberi manfaat bagi masyarakat luas dan tidak melanggar prinsip-prinsip moral serta agama.

Tabel 1. Implementasi Nilai Ketuhanan dalam BUMD

Nilai Ketuhanan	Bentuk Implementasi	Dampak Sosial
Amanah	Penempatan pejabat BUMD berdasarkan kapabilitas dan moral.	Kepercayaan publik meningkat terhadap profesionalisme BUMD.
Kejujuran	Laporan keuangan diaudit eksternal dan dipublikasikan secara terbuka	Meningkatnya akuntabilitas dan partisipasi publik.
Keadilan	Distribusi layanan tidak hanya di kota besar tetapi juga di pedesaan.	Pemerataan pembangunan, menurunnya keluhan pelayanan.
Empati sosial	Pemberian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	Menurunnya beban hidup masyarakat kecil.

Tabel ini menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual seperti kejujuran dan amanah berdampak langsung pada persepsi masyarakat terhadap BUMD. PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD mengatur tata kelola perusahaan yang baik, yang bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan dan memastikan keseimbangan hubungan antara pemangku kepentingan. Misalnya, ketika laporan keuangan dibuka untuk publik dan diaudit secara independen, ini menunjukkan bahwa pengelola tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga sadar secara moral. Praktik seperti itu menciptakan

kepercayaan publik yang tinggi dan mengurangi prasangka negatif seperti korupsi atau kolusi.

Penerapan keadilan operasional, seperti penyebaran layanan hingga pelosok desa, menegaskan bahwa BUMD benar-benar hadir untuk semua kalangan, bukan hanya kelas ekonomi menengah ke atas yang tinggal di pusat kota. Hal ini secara nyata menurunkan disparitas antarwilayah dan memperkuat stabilitas sosial.

2. Etika Bisnis sebagai Pilar Utama Keberlanjutan Operasional BUMD

Dalam berbagai pernyataan para ahli, menyatakan bahwa orientasi etika dalam bisnis BUMD tidak hanya mencegah penyimpangan perilaku korporasi, tetapi juga mampu memperkuat hubungan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan internal, tanggung jawab sosial, dan transparansi keuangan menjadi bagian penting dalam pembentukan budaya organisasi yang sehat.

Tabel 2. Dimensi Etika Bisnis dalam Operasional BUMD

Dimensi Etika	Contoh Implementasi	Hasil yang Dicapai
Keadilan dalam SDM	Seleksi pegawai dilakukan terbuka tanpa nepotisme.	Meningkatkan semangat kerja dan loyalitas pegawai.
Tanggung jawab sosial	CSR menyoar kebutuhan dasar: air bersih, pendidikan.	Meningkatkan citra perusahaan dan kepercayaan masyarakat.
Transparansi dan integritas	Diseminasi informasi proyek dan tender secara daring.	Mencegah praktik korupsi dan memperkuat partisipasi publik.
Etika lingkungan	Investasi pada teknologi ramah lingkungan.	Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan citra ramah lingkungan.

Tabel ini memperlihatkan bagaimana etika bisnis diimplementasikan bukan hanya dalam hubungan internal, seperti hubungan antara manajemen dan karyawan, tetapi juga dalam eksternalitas seperti pengelolaan lingkungan dan interaksi dengan masyarakat. Ketika rekrutmen dilakukan secara terbuka dan berbasis kompetensi, hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, terutama yang dilakukan secara daring, menjadi bukti bahwa BUMD ingin menjauh dari praktik transaksional yang merugikan publik. Lebih dari itu, CSR yang menyentuh kebutuhan riil seperti akses air bersih dan pendidikan membuktikan bahwa perusahaan mengembalikan keuntungan bukan untuk pencitraan semata, melainkan benar-benar peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Kontribusi Pengelolaan Berbasis Nilai terhadap Keadilan Sosial

Nilai paling penting yang ingin dicapai dari pengelolaan berbasis etika dan ketuhanan adalah keadilan sosial. BUMD yang berpihak pada masyarakat kecil, bukan hanya secara formal tetapi dalam implementasi program dan kebijakan, berperan sebagai katalis perubahan sosial di daerahnya.

Tabel 3. Kontribusi BUMD terhadap Keadilan Sosial

Aspek Sosial	Program BUMD	Dampak Nyata
Pemerataan ekonomi	Kemitraan dengan petani lokal dan UMKM.	Peningkatan pendapatan kelompok marginal.
Akses pelayanan publik	Pelayanan air minum, listrik dan transportasi murah.	Berkurangnya kesenjangan pelayanan antara kota dan desa.
Pengentasan kemiskinan	Pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan.	Penurunan angka pengangguran di daerah.
Pendidikan dan SDM	Beasiswa dan pelatihan kerja bagi pemuda.	Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.

Program kemitraan antara BUMD dan UMKM lokal bukan hanya memberikan suplai bahan atau distribusi produk, tetapi merupakan bentuk redistribusi nilai ekonomi ke kelompok yang sebelumnya termarginalkan. Demikian juga dengan layanan transportasi dan air minum bersubsidi, yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mempertegas keberpihakan pada keadilan sosial.

Pelatihan kerja dan beasiswa pendidikan menjawab tantangan jangka panjang, yaitu membangun kapasitas SDM lokal agar mampu bersaing dan mandiri. Ini bukan hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga menumbuhkan semangat dan harga diri masyarakat setempat.

4. Sintesis Tematik: Pilar Transformasi Moral Bisnis BUMD

Analisis tematik dari data kualitatif mengidentifikasi tiga tema besar yang menjadi pilar transformasi bisnis BUMD:

- Ketuhanan sebagai Kompas Moral

Prinsip-prinsip agama tidak lagi dianggap sebagai ranah personal, melainkan dimasukkan dalam keputusan strategis, sehingga orientasi bisnis lebih bijaksana dan berorientasi kemaslahatan.

- Etika sebagai Sistem Kontrol Sosial

Dengan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, organisasi tidak memerlukan pengawasan berlebihan dari luar. Budaya etis menjadi pengatur otomatis untuk mencegah penyimpangan.

- Keadilan Sosial sebagai Indikator Kesuksesan

Keuntungan finansial tidak lagi menjadi indikator tunggal keberhasilan BUMD. Kesetaraan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan manfaat menjadi ukuran utama.

5. Tantangan Implementasi

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai ketuhanan dan etika dalam manajemen BUMD:

- Rendahnya literasi spiritual manajerial, di mana banyak pengelola belum memahami secara menyeluruh makna dan penerapan nilai religius dalam konteks bisnis modern.
- Kurangnya dukungan kebijakan daerah untuk mendorong transformasi etis dan religius di struktur kelembagaan BUMD.
- Budaya birokratis yang masih paternalistik, menyulitkan lahirnya pemimpin yang berorientasi etis dan transformatif.
- Keterbatasan dana operasional, yang membuat program sosial dan lingkungan dianggap sebagai beban tambahan, bukan investasi sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan BUMD yang berbasis pada nilai ketuhanan dan etika bisnis memiliki dampak signifikan terhadap terciptanya keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat daerah. Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Hasil penelitian yang dianalisis secara tematik dan didukung oleh data kualitatif dari wawancara serta literatur, mengungkap beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Nilai Ketuhanan sebagai Landasan Manajerial.

Pengelolaan BUMD dengan pendekatan nilai ketuhanan seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, terbukti memberikan arah moral yang kuat dalam pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Pendekatan ini mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta kepedulian sosial dalam operasional BUMD. BUMD merupakan badan usaha milik daerah yang tujuan utamanya melayani masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa BUMD harus menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggarannya, sedangkan wujud dari ketiga prinsip tersebut adalah pembuatan laporan pertanggungjawaban.

2. Etika Bisnis sebagai Pilar Penguatan Institusi.

Etika bisnis dalam BUMD tidak hanya menumbuhkan kepercayaan publik dan memperkuat hubungan dengan masyarakat, tetapi juga menciptakan budaya organisasi yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Penerapan etika seperti keadilan rekrutmen, tanggung jawab sosial, dan pelaporan transparan merupakan kunci dari tata kelola modern yang adaptif.

3. Kontribusi Nyata terhadap Keadilan Sosial.

BUMD yang dikelola dengan pendekatan ini menunjukkan kontribusi yang kuat dalam hal pengentasan kemiskinan, pemerataan akses layanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesuksesan BUMD tidak lagi diukur dari profitabilitas semata, melainkan dari seberapa besar manfaat sosial yang diberikan kepada masyarakat.

4. Tantangan Implementasi yang Perlu Dihadapi.

Implementasi nilai-nilai ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural, seperti rendahnya literasi etika dalam manajemen, budaya birokratis yang belum progresif, serta keterbatasan regulasi yang mendukung reformasi nilai dalam tata kelola BUMD. Oleh karena itu, transformasi nilai ini memerlukan dukungan sistemik dari pemerintah daerah dan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan.

5. Revolusi Bisnis sebagai Proses Jangka Panjang.

Penerapan nilai ketuhanan dan etika bukanlah sekadar program atau strategi sesaat, melainkan merupakan sebuah revolusi nilai yang memerlukan komitmen jangka panjang, reorientasi paradigma manajerial, serta integrasi nilai spiritual dalam kebijakan, proses, dan output bisnis daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai ketuhanan dan etika bisnis dalam pengelolaan BUMD berkontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial yang berkeadilan. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan keadilan memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika bisnis juga membentuk budaya organisasi yang lebih peduli terhadap masyarakat.

BUMD yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip moral ini terbukti dapat berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kualitas layanan publik. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan, seperti rendahnya literasi etis manajerial dan kurangnya regulasi pendukung. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama melalui dukungan kebijakan, reformasi budaya organisasi, dan peningkatan partisipasi publik guna memperkuat transformasi moral dan sosial BUMD sebagai agen pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2007). *Etika Bisnis Islam: Membangun Keunggulan Bisnis dengan Moral dan Etika*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Drucker, P. F. (2001). *The Essential Drucker*. New York: Harper Business.
- Fadillah, A., & Setiawan, D. (2020). Etika Bisnis dan Implikasinya dalam Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 45–56.
- Fitriani, N., & Ramadhani, R. (2021). BUMD Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 5(2), 102–111.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, N., & Kartika, D. (2022). Spiritualitas dalam Bisnis: Nilai Ketuhanan dalam Tata Kelola Organisasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 80–92.

- Indrawati, R. (2020). Good Corporate Governance pada BUMD dalam Mendorong Kinerja Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(3), 201–210.
- Kurniawan, B. (2017). Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2), 115–123.
- Sitompul, S. P., & Harefa, F. Z. (2024). Analisis perbedaan penyusunan laporan keuangan BUMD berdasarkan SAK ETAP dengan SAK Entitas Privat di Perumda Tirta Uumbu Kabupaten Nias. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 8(1), 89–96.
- Azhari, M. R. (2017). Model pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). *Jurnal Yustisia*, 6(2), 232–245.
- Aziz, A; dkk. (2023). Keadilan Dalam Etika Bisnis Sebagai Pertimbangan Bisnis, Etika, Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 3(2), 172–178
- Aprianto, L. (2017). The Power Of Spirituality: Menyanding Nilai-Nilai Ketuhanan Dalam Penerapan Etika Bisnis (Pendekatan Perspektif Kristen Tentang Aspek Kepemimpinan, Sumber Daya Karyawan, Kompetitor Dan Keseimbangan Alam). *JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS)*, 1(2), 48 – 55.
- Briando, B; Sulisty, A. (2019). Etika Profetik Bagi Pengelola Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 10(2), 342-364.
- Wijayanto, N. (2023). Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Indigenous: Jurnal Ilmiah Populer dan Media Pengkajian Masalah Sosial*, 2(3), 197-207
- Widiyastuti, S. (2019). Politik Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Kegiatan Bisnis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Law and Justice*, 4(1), 12-22.
- Wahyuni, R. (2024) Kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Warga Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi: Sengketa Pemenuhan Hak Atas Air Antara Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan Warga di Perumahan Sentul City). *UNES LAW REVIEW*, 6(4), 12142- 12158.
- Siahaan, R. (2024). Peranan Sila Ketuhanan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*, 2(3), 73-81.
- Fistari, A; dkk. (2023). Pancasila Sebagai Sistem Etik Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Indigenous: Jurnal Ilmiah Populer dan Media Pengkajian Masalah Sosial*, (JUBPI), 2(7), 531-534.
- Nasirwan, Lubis, A. Z. Y., Bhayangkara, A., & Sitanggang, E. M. S. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan: Studi kasus pada BKAD Provinsi Sumatera Utara. *As-Syirkah: Islamic Economics Financial Journal*, 3(3), 1-15.